

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo
Indopos Pos Kota Warta Kota

Susun Semanggi Belum Jadi Aset DKI

JAKARTA – Simpang Susun Semanggi (SSS) yang telah beroperasi ternyata belum menjadi aset Pemprov DKI Jakarta. Saat ini anggaran pembangunan yang menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) masih dihitung.

Proyek SSS merupakan KLB PT Mitra Panca Persada (MPP) dengan total anggaran sebesar Rp579 miliar. Berdasarkan hitungan perusahaan tersebut, pembangunan SSS menelan Rp369 miliar. Artinya, ada sisa Rp210 miliar yang sedang dihitung tim appraisal.

Pembangunan SSS ini bagian dari kontrak PT Wijaya Karya selaku kontraktor dan PT MPP selaku pengembang. "Untuk itu, kami tidak mengetahui rincian biaya pembangunan, termasuk LED yang terpasang melingkar di SSS. Tim masih proses menghitung nilai asetnya. Mereka berada di bawah koordinasi Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)," ungkap Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hananto Krisna kemarin.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faisal mengatakan, terhadap sisa anggaran Rp210 miliar digunakan untuk penataan ulang jalan pedestrian/trotoar di Jalan Sudirman diluar area *mass rapid transit* (MRT).

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menuturkan, rincian pembangunan dapat diketahui apabila tim appraisal sudah selesai menghitung total biaya pembangunan SSS. Jika nilainya kurang seperti dalam perjanjian kerja sama, pengembang harus membangun sarana dan prasarana lagi. "Ya, BPAD yang mengetahui kapan serah terima dilakukan," kata dia.

Kepala BPAD DKI Jakarta Ahmad Firdaus berharap berita acara serah terima (BAST) dilakukan sebelum pergantian tahun. Setelah ada BAST, serah terima aset baru bisa dilaksanakan. "Tim appraisal masih bekerja," ucap dia.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani mengatakan, penyerahan aset SSS milik perusahaan swasta harus dilakukan terlebih dulu sehingga besaran dana pembangunan SSS dengan peningkatan luas gedung perusahaan swasta seimbang. "Harus diaudit terlebih dahulu. Saya dengar dana SSS sekitar Rp369 miliar? Apakah sesuai dengan bangunannya? Lalu, apakah seimbang dengan nilai KLB perusahaan swasta? Kalau tidak, ya jadi temuan dan harus dipertanggungjawabkan," ungkap dia.

Dia menilai banyak pembangunan di Jakarta era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan dana perusahaan swasta baik KLB maupun *corporate social responsibility* (CSR). Anehnya, pembangunan yang seharusnya menjadi milik Pemprov DKI tidak tercatat dan banyak yang belum diserahkan. Apabila tercatat, tentu pembangunan di Jakarta tidak tumpang tindih dan merata.

"Banyak aset baik gedung atau taman yang dibangun swasta. Saya tanya ke BPAD katanya belum terdata. Pantassaja lah sendiri di Cengkareng dibeli sendiri oleh Pemprov DKI," kata dia.

Untuk mencegah itu, dia

mendesak Pemprov DKI segera membentuk peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan aset hasil KLB atau CSR perusahaan swasta. Dengan ada perda, gubernur DKI tidak bisa begitu saja menggunakan dana perusahaan swasta untuk pembangunan, khususnya infrastruktur. "Pembangunan infrastruktur itu berkelanjutan dan sebaiknya menggunakan anggaran daerah," ungkap dia.

Simpang Semanggi merupakan *trouble spot* titik kemacetan krusial di jantung lalu lintas Jakarta yang dampaknya sangat luas. Ini diakibatkan fenomena *weaving-conflict* yakni arus lalu lintas yang bersilangan baik di Jalan Gatot Subroto maupun Jalan Sudirman kolong Jembatan Semanggi. Benturan antar-kendaraan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan berpotensi terkunci yang merepotkan aparat Polda Metro Jaya mengatur lalu lintas di simpang ini. Sistem buka-tutup lajur jalan terkadang perlu dilakukan. Dengan beroperasinya SSS, diperkirakan akan meningkatkan level layanan lalu lintas kendaraan Simpang Semanggi sebesar 30-40%.

Ikon baru Jakarta ini dibangun dengan salah satu teknologi tercanggih. Dua jembatan layang yang melingkar tersusun atas 333 segmental *box girder* yang telah dicetak dan disusun cermat. Dari sisi estetika, bangunan tersebut memiliki ornamen daun semanggi yang

dipercantik dengan pencahayaan pada malam hari.

Memiliki panjang 1.622 meter simpang susun terbagi menjadi dua *ramp* yaitu Grogol atau Slipi menuju arah Blok M dan Gatot Subroto menuju arah Jalan MH Thamrin. Kendaraan dari arah Cawang bisa langsung belok kanan menuju MH Thamrin - Monas. Begitu juga dari arah Slipi ke Senayan - Blok M. Dalam kondisi normal hanya butuh 2-3 menit melintasi jalur tersebut.

● bima setiyadi

"Harus diaudit terlebih dahulu. Saya dengar dana SSS sekitar Rp369 miliar? Apakah sesuai dengan bangunannya?"

ABDUL GHANI

Ketua Fraksi Partai Gerindra
DPRD DKI Jakarta

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Susun Semanggi Belum Jadi Aset DKI

IKON BARU JAKARTA

Simpang Susun Semanggi (SSS) telah dioperasikan, namun proyek tersebut belum diserahkan dari pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. Anggaran pembangunan berasal dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) PT MPP sebesar Rp369 miliar.

JALAN LAYANG MELINGKAR DI SEMANGGI

- **Pengoperasian:** 17 Agustus 2017
- **Anggaran:** Berasal dari KLB PT MPP sebesar Rp579 miliar. Untuk pembangunan SSS Rp369 miliar dan sisanya Rp210 miliar pembangunan trotoar.
- **Panjang:** 1.622 meter terdiri atas 826 meter untuk ramp Semanggi-Bundaran HI dan 796 meter untuk ramp Grogol-Blok M.
- **Jalur:** Kendaraan dari arah Cawang/Pancoran yang hendak ke Bundaran HI dan kendaraan dari arah Slipi menuju Blok M.
- **Total kendaraan melintas di Semanggi:** 250.000 unit

PROYEK BELUM BERES

Flyover Cipinang Lontar	550 meter
Flyover Pancoran	850
Flyover Bintaro Permai	450
Underpass Mampang Kuningan	870
Underpass Matraman	870
Underpass Kartini	420

JUMLAH PERJALANAN DI JABODETABEK (PER HARI)

- DKI Jakarta: 18,77 juta
- Dari Bekasi: 2,52 juta
- Dari Tangerang: 2,19 juta
- Bogor dan Depok: 2,24 juta
- Total perjalanan dari wilayah komuter: 6,96 juta

USULAN POLDA METRO JAYA MENGATASI KEMACETAN

- Memaksimalkan fungsi Traffic Management Center (TMC) terkait pemanfaatan kamera pengintai/CCTV di Dinas Perhubungan (Dishub) ke TMC.
- Sterilisasi jalur bus Transjakarta (*busway*). Caranya dengan peninggian separator sekitar 30 cm agar tidak ada lagi penyerobotan kendaraan pribadi.
- Perbaikan marka atau rambu jalan.
- Penambahan volume jalan baik dengan melebarkan jalan maupun menyelesaikan jalan-jalan yang sudah dibuat sehingga akan maksimal penggunaannya.
- Memperbaiki tata ruang terkait pembangunan pusat perbelanjaan dan gedung yang harus memikirkan aspek lalu lintas.

Sumber: diolah dari berbagai sumber